

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan di Negara manapun merupakan salah satu persoalan yang mendasar, yang dimana akan menjadi pusat perhatian di suatu Negara tersebut. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kinerja pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang layak dan membuka lapangan kerja sehingga dapat menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dimana inti penting dalam sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu Negara tersebut. Disuatu negara manapun adalah salah satu penyakit ekonomi, maka harus ada upaya untuk menyembuhkan ataupun menguranginya. Kemiskinan merupakan suatu dimana sifat multidimensional dengan masalah yang kompleks adalah bagian dari kemiskinan. Dengan hal tersebut maka cara menghilangkan kemiskinan dengan cara komprehensif, mencakup dari berbagai kehidupan dalam masyarakat, juga akan dilakukan dengan terpadu (M. Nasir, 2008).

Ketika terdapat istilah kemiskinan yang keluar ketika dimana seseorang maupun kelompok orang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan ataupun kemakmuran ekonomi yang dimana kebutuhan tersebut adalah kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Jika dari sisi etimologis, dimana “miskin” dapat diartikan bahwa tidak memiliki harta dan juga benda hidup dengan kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik menentukan masyarakat miskin pada segi kebutuhan dasar. Bisa juga ditentukan dengan tidak dapatnya seseorang memenuhi kebutuhan dasarnya minimal untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya (BPS dan Depsos, 2002). Lebih lanjut lagi mengenai kemiskinan adalah semacam suatu kondisi dimana kondisi tersebut terdapat dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, non-makanan maupun makanan bisa juga disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) yang bisa juga disebut sebagai batas kemiskinan (*poverty threshold*). Jadi dapat disimpulkan bahwa jika seseorang akan dapat dikatakan dia miskin bila pendapatan orang tersebut ada di bawah garis kemiskinan.

Masalah di Indonesia yang membahas tentang kemiskinan akan selalu jadi masalah yang besar, dimana dalam Negara tersebut tidak terpelihara. Pada (Tabel 1.1) tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Bersumber dari laporan BPS, pada penduduk miskin pada periode 2016-2018, dimana pada tahun 2016 tingkat kemiskinan berada pada 10,70 persen, pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada 10,12 persen dan pada tahun 2018 pada bulan September sekitar 9,82 persen dimana tingkat kemiskinan Indonesia dari waktu ke waktu mengalami tingkat penurunan. Dengan adanya data yang menunjukkan pada tahun ke tahun kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, dengan begitu pada kejadian tersebut akan menjadi acuan pemerintah apakah praktik pemerintah dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan telah berjalan dengan baik atau tidak, penduduk dengan penghasilan di sekitar garis kemiskinan jika terdapat inflasi pada tahun depan atau tahun yang akan datang dengan naiknya harga barang-barang terutama dengan naiknya kebutuhan pokok maka akan terancam bergeser pada posisi miskin maka dari itu pemerintah diharapkan untuk tidak puas dengan hasil tersebut, pemerintah harus terus berupaya dalam mengatasi kemiskinan.

**Tabel 1.1**  
Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)			Garis Kemiskinan (rupiah)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372,114	350,420	361,990
2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400,995	370,910	387,160
2018	10,13	15,54	25,67	7,02	13,20	9,82	425,770	392,154	410,670

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2018, diolah

Berdasarkan tabel (Tabel 1.1), maka pemerintah harus terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan, untuk mewujudkan pengurangan pada tingkat kemiskinan di Indonesia agar tingkat kemiskinan di Indonesia akan dapat diturunkan lagi tingkat kemiskinannya dan khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tabel selanjutnya yang dibawah ini mengalami penurunan 2016 sebesar 13,19%, 2017 sebesar 12,23% dan 2018 sebesar 11,32%. Ditunjukkan pola yang menurun yang menunjukkan bahwa kemiskinan yang mengalami penurunan yang memberikan dampak positif.

**Tabel 1.2**  
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah  
menurut Daerah Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2016	1.879,55	2.614,20	4.493,75	11,38	14,88	13,19
2017	1.815,58	2.381,92	4.197,49	10,55	13,92	12,23
2018	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Dalam Angka, Tahun 2018

Dengan adanya perbandingan dengan provinsi lain maka diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam upaya mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah dengan perhitungan dari tahun 2016-2018 dapat dilihat bahwa pada tahun tersebut telah mengalami penurunan. Bisa dilihat bahwa kemiskinan masih tinggi dan diatas 10%. Bisa dilihat pada tabel yang selanjutnya adalah rata-rata dari kemiskianan pada enam provinsi. Dengan tingkat Rata-rata kemiskinan di Jawa tengah dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi jawa tengah berada di urutan ketiga dengan jumlah 12,24 persen.

**Tabel 1.3**  
Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa 2016-2018  
(Persen)

<b>Provinsi</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rata-rata</b>
DKI Jakarta	3,75	3,78	3,57	3,7
Jawa Barat	8,77	7,83	7,45	8,01
Jawa Tengah	13,19	12,23	11,32	12,24
DI Yogyakarta	13,10	12,36	12,13	12,53
Jawa Timur	11,85	11,20	10,98	11,34
Banten	5,36	5,59	5,24	5,4

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018, diolah

Pada tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah belum merata masih ada sebagian kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat kemiskianan yang tinggi. Terdapat tiga Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah 10 persen, yaitu Kabupaten Kudus, Kota Salatiga dan Kota Semarang sedangkan yang lainnya diatas 10 persen. Hal ini memperlihatkan jika usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan belum merata ke seluruh Kabupaten/Kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah PDRB, Investasi Pendidikan, Investasi Kesehatan. Dari ketiga faktor tersebut memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan.

**Tabel 1.4**  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2016-2018

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)</b>
2016	849099,35
2017	893750,44
2018	941283,28

Sumber BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, Berbagai Tahun Terbitan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2016 terdapat 849099.35 , pada tahun 2017 893750.44 dan pada tahun 2018 terdapat 941283.28.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah investasi pendidikan. Di Indonesia dalam masalah investasi pendidikan maka secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Cohn (1979) menyebutkan ketika seseorang ataupun individu mengikuti pendidikan maka dia akan memperoleh peluang yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan, dapat meningkatkan produktivitas, dan juga dalam peningkatan pendapatan di dalam kehidupannya serta masyarakat juga mendapatkan manfaat dari produktivitas tenaga kerja terdidik. Sejalan dengan hal tersebut pada pemikiran Becker (1993) juga mengatakan bahwa investasi

dibidang pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berguna (*benefit*) yang lebih besar jika dibandingkan dengan investasi di bagian ekonomi ataupun di bidang yang lainnya, oleh karena itu benefit melalui investasi pendidikan dalam individu dan masyarakat tidak hanya berdampak pada materi tetapi juga non materi. Manfaat dalam bentuk materi dapat berupa penghasilan, sedangkan manfaat non materi sangat beragam, diantaranya: perilaku produktif, perilaku sehat, keharmonisan dalam keluarga, berperilaku berbudaya dan juga partisipasi sebagai warga Negara (Coomb dan Hallack,1972; Ahmed,1975; Fagerlind, 1983; Hall, 2000).

Berdasarkan konteks diatas dapat diperoleh suatu indikasi bahwa semakin besar jumlah kelompok masyarakat terdidik, maka akan semakin besar pula manfaat ekonomi maupun manfaat non ekonomi yang akan diperoleh masyarakat secara keseluruhan. Namun manfaat ini menjadi kurang signifikan bagi pembangunan apabila tidak ditopang oleh basis kultural masyarakat, terutama budaya belajar dan bekerja, karena proses dan hasilnya tidak sesuai dengan akhlak, moral dan etika bangsa. Untuk itu, manivestasi aspek-aspek non materi dan pedidikan itu akan mengarah pada aktualisasi kemampuan yang harus mempribadi dan sekaligus dapat digunakan sebagai modal dasar dalam memasuki persaingan global antar peradaban bangsa. Oleh karena itu pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia telah semakin disadari oleh para perencana pembangunan di berbagai Negara. Untuk mencapainya, setiap Negara memiliki strategi tersendiri di dalam mengembangkan pendidikan nasional.

Pengkajian atas praksis pendidikan sebagai bentuk investasi modal manusia (*human investment*) menuntun penerapan prinsip-prinsip investasi sebagaimana yang diterapkan di dalam dunia usaha. Namun demikian investasi modal manusia harus

dipandang secara unik dan berbeda dengan investasi modal non manusia. Keuntungan dan kerugian atas hasil *human investment* baru dapat diketahui dalam jangka panjang, sementara itu investasi non manusia dapat diketahui dalam jangka relative pendek. Demikian pula investasi modal manusia akan menghasilkan keuntungan bagi individu (*private benefit*) dan masyarakat (*social benefit*) sebagai akibat dari individu anggota masyarakat yang menyelesaikan pendidikan.

Dari banyaknya pengeluaran yang dilekuarkan pemerintah akan menjadikan tolak ukur terhadap banyaknya perhatian pemerintah terhadap usaha dalam pengembangan SDM. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan SDM sangatlah penting kualitas SDM suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah melalau pencapaian kualitas seperti pendidikan. Kemajuan pengeluaran untuk pendidikan sangat diharapkan akan mampu meningkatkan pendidikan di masyarakat. Dari meningkatnya pendidikan akan dapat memajukan produktivitas tenaga kerja. Investasi pendidikan guna meningkatkan pencapaian kualitas pendidikan di Jawa Tengah pada tahun 2016-2018 terus meningkat pada tahun 2016 investasi pendidikan di jawa tengah mencapai 22,426.20 pada tahun 2017 mencapai 23,363.52 da pada tahun 2018 mencapai 24,993.66.

**Tabel 1.5**  
Perkembangan Investasi Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2016-2018

<b>Tahun</b>	<b>Investasi Pendidikan (Juta Rupiah)</b>
2016	22,426.20
2017	23,363.52
2018	24,993.66

Sumber : NPD (Neraca Pendidikan Daerah)tahun 2017, diolah

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah investasi kesehatan. Perbaikan kesehatan masyarakat bisa dilihat dari adanya sarana dan prasarana kesehatan. Dari Tabel 1.6, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 investasi kesehatan provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 4.388.397.643.016 dan pada tahun 2017 investasi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi 5.577.667.883.591 dan pada tahun 2018 menjadi 6.033.213.610.648.

**Tabel 1.6**  
Perkembangan Investasi Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2016-2018

<b>Tahun</b>	<b>Investasi Kesehatan (Triliun Rupiah)</b>
2016	4.388.397.643.016
2017	5.577.667.883.591
2018	6.033.213.610.648

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018,diolah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2016-2018 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa menempati tingkat nomor dua setelah DI Yogyakarta. Karena pemerintah belum dapat pemeratakan usaha dalam mengatasi kemiskinan maka hal tersebut berdampak pada perekonomian.

Perlu adanya penekankan usaha manusia dalam rangka mencari rezeki. Rezeki makhluk telah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi manusia memiliki kewajiban untuk menaati peraturan Allah dengancara memanfaatkan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Hal ini berarti bahwa adanya seseorang tidak mendapatkan rezekinya adalah karena dirinya tidak berkehendak untuk mencarinya.



Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah[2/87]: 177

لَيْسَ الذِّبْرَانُ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الذِّبْرَانَ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا غَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ  
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

## **B. Batasan Masalah**

Karena banyaknya keterbatasan yang dilakukan saat penelitian, maka ada beberapa masalah yang tidak akan diteliti. Dari uraian tersebut, maka batasan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah:

1. Subyek dari penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah
2. Seorang peneliti hanya memfokuskan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah

## **C. Rumusan Masalah**

Kemiskinan adalah salah satu nilai keberhasilan pembangunan, kemiskinan menjadi tolak ukur ekonomi dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ada banyak masalah-masalah yang muncul yang diakibatkan oleh meningkatnya kemiskinan.

Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2018 masih memperlihatkan jika kemiskinan masih tinggi.

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh investasi pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2016-2018?
3. Bagaimana pengaruh investasi kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2016-2018?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai adalah ;

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.
2. Menganalisis pengaruh investasi pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.
3. Menganalisis pengaruh investasi kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

##### 1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, semoga pada penelitian ini dapat berguna dan juga dalam penelitian ini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan samoga dapat menjadi landasan ataupun tolak ukur dalam mengatasi kemiskinan.

##### 2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum diharapkan pada penelitian ini semoga mampu memberikan khasanah ilmu ekonomi khususnya pada ekonomi pembangunan. Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.